

dr. Siti Hannah, MKM



**OPTIMALISASI
PROGRAM PELAYANAN**

**KELUARGA
BERENCANA**



(KB) DI INDONESIA

Biografi



dr. Siti Hannah, MKM

Penulis lahir pada tanggal 4 Agustus 1980 di Jakarta. Penulis beragama Islam dan berstatus menikah. Riwayat pendidikan penulis yaitu Profesi Dokter di Universitas Tarumanagara, Jakarta dan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, Jakarta.

Pekerjaan penulis yaitu sebagai wakil ketua II STIF Syentra, sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden sejak tahun 2021 s/d sekarang, sebagai Ketua Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Jakarta III sejak tahun 2021 s/d sekarang, sebagai DPS Asuransi Syariah, dan sebagai Assesor RS Syariah. Aktivitas organisasi yang diikuti penulis sekarang yaitu Pengurus LKPBNU, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Pengurus Pusat Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Pengalaman pekerjaan penulis yaitu sebagai Dokter PTT Daerah Provinsi Banten pada tahun 2007-2009, Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2010-2014, sebagai Dokter Dialog Interaktif Kerjasama PDUI dan BTPN pada tahun 2011-2014, sebagai Dokter Layanan Kesehatan Kerjasama PDUI dan BTPN pada tahun 2011-2014, sebagai Supervisor Kader Kesehatan Kerjasama PDUI dan BTPN pada tahun 2013-2014, sebagai Dokter Puskesmas Larangan Utara, Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2014-2016, Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019, dan sebagai Analisis Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2020-2021.

OPTIMALISASI PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI INDONESIA

Siti Hannah



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**OPTIMALISASI PROGRAM PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA (KB) DI INDONESIA**

Penulis : Siti Hannah

Editor : Darmawan Edi Winoto, M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-280-4

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**Eureka Media Aksara bekerja sama dengan Sekolah Tinggi
Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF SYENTRA) Banten**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Optimalisasi Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Di Indonesia” Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

PP No.38/2007 dan PP No.48/2007 menjelaskan bahwa Program Keluarga Berencana adalah urusan wajib, dan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Keluarga Berencana. Meski telah ada PP38 dan PP41 tahun 2007, namun pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada era otonomi daerah masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang timbul pada faktor birokrasi, sumber daya manusia, dan ketepatan alokasi anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan Program KB yang berakibat belum tercapainya hasil program KB sesuai dengan target yang diharapkan sehingga diperlukan langkah-langkah strategis agar program KB dapat tercapai secara lebih optimal.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
BAB 2 KELUARGA BERENCANA.....	7
A. Program Keluarga Berencana	7
B. Perkembangan Kebijakan KB di Indonesia.....	13
C. Perkembangan Kebijakan Keluarga Berencana di Kenya.....	20
D. Perkembangan Program KB di Indonesia.....	26
BAB 3 IMPLEMENTASI PROGRAM KB DI INDONESIA.....	34
A. Struktur Organisasi.....	34
B. Sumber Daya Manusia	39
C. Pedoman Tata Laksana Program KB di Indonesia.....	43
D. Efektifitas Pelaksanaan Program KB.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53
TENTANG PENULIS.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Estimasi Perkembangan Penduduk	2
Tabel 2 Dimensi dan Fokus Pembangunan Kapasitas	12
Tabel 3 Status Kelembagaan Pemerintah Daerah	32



**OPTIMALISASI PROGRAM PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA (KB) DI INDONESIA**

SITI HANNAH



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah akan selalu berpengaruh terhadap ekonomi dan ruang tampung daerah tersebut. Ketika laju pertumbuhan tidak terkontrol maka akan berpengaruh terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Begitu pula ketika lingkungan tidak bisa memberi ruang yang sepatutnya bagi kehidupan penduduk. Jika tidak ada keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan ruang yang tersedia maka secara otomatis lingkungan tersebut juga tidak akan stabil.

Sebelum reformasi, pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu bidang kebijakan unggulan. Ini dimulai sejak Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan tahun 1967 di Den Haag, Belanda dilanjutkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Kependudukan Dunia di Bukarest tahun 1974.

Selain itu, Indonesia menyadari permasalahan kependudukan yang semakin rumit dan bersifat multi-dimensional, dan program KB diyakini akan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pada 1970 secara resmi dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menangani kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Struktur organisasi BKKBN ditetapkan secara vertikal dari Pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota.

Struktur tersebut dilengkapi dengan tenaga petugas

BAB

2

KELUARGA BERENCANA

A. Program Keluarga Berencana

Sebagaimana tercermin dalam pengertian KB yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1992, paling tidak KB menangani empat aspek, yaitu: (1) pendewasaan usia perkawinan, (2) pengaturan kelahiran, (3) pembinaan ketahanan keluarga, dan (4) peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini berarti program KB tidak sekadar berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas penduduk. Semuanya itu harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki posisi strategis sebagai titik sentral pembangunan.

Masih berdasarkan UU di atas, tujuan Program KB secara makro adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan menurunkan angka kelahiran. Secara mikro KB bertujuan mewujudkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB 3

IMPLEMENTASI PROGRAM KB DI INDONESIA

A. Struktur Organisasi

Menurut Rodinelli (1983) dalam Nurcholis (2007) bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya dukungan organisasi pemerintahan yang mampu menjalankan kebijakan desentralisasi secara efektif.

Menurut Merillie S. Grindle (1997) dalam Ramses Andy dan La bakry (2009), dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah maka yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan peran mereka dengan melakukan apa yang disebut sebagai "*capacity building*" yaitu dengan memperkuat organisasi agar dapat bekerja lebih baik.

Memperkuat organisasi ini dapat dilakukan apabila organisasi yang telah dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau belum sesuai maka harus dibangun organisasi yang baru. Sebab suatu organisasi harus bersifat fleksibel, dalam arti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan/masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Selain itu organisasi harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal terhadap lingkungannya. Dengan kata lain suatu organisasi haruslah proporsional dengan realitas kebutuhan lingkungannya. Selain itu strukturnya tidak boleh menjadi terlampau kecil, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal.

PP41/2007 pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata

BAB

4

PENUTUP

PP No.38/2007 dan PP No.48/2007 menjelaskan bahwa Program Keluarga Berencana adalah urusan wajib, dan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Keluarga Berencana. Meski telah ada PP38 dan PP41 tahun 2007, namun pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada era otonomi daerah masih mengalami beberapa kendala.

Pertama, struktur birokrasi program KB belum memadai, dan kurang efektif dalam mendukung pencapaian target program KB sehingga menyebabkan belum tercapainya target hasil Program KB. Hal ini dapat dilihat dari :

1. struktur organisasi yang belum mencakup aspek-aspek penting Program KB seperti yang tertuang dalam Keppres No.103/2001, serta belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis di tingkat kecamatan sehingga terjadi kebuntuan struktur organisasi di lini terdepan
2. garis vertikal penghubung antara Pemda Kabupaten dengan Pemda Provinsi dan Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi, sehingga tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah terlihat sangat lemah dan akibatnya sering menjadi penghambat pengelolaan program pembangunan nasional.
3. koordinasi pelaksanaan program KB antar sektor masih bersifat momentum, dan terjadi penurunan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program KB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alimoeso, Soedibyo, 2009, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi, Kepemimpinan dan Pemberdayaan Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat*. Jakarta: Universitas Satya Negara.
- Barker, C, 1996, *The Health Care Policy Process*. London: Sage Publication.
- Buse, Kent, & Nicholas Mays & Gill Walt, 2005, *Making Health Policy*. Open University Press, England
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ekowati, MRL., 2009, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program; Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Gerston, Larry N., 1983, *Making Public Policy; From Conflict to Resolution*. Library of Congress cataloguing in Publication Data, USA
- Hull, Terence H., 2006, *Masyarakat Kependudukan dan Kebijakan di Indonesia; Dari Keluarga Berencana ke Pelayanan Reproduksi: Sebuah Riwayat Singkat*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Perbandingan Administrasi Publik (Model Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media
- , 2009, *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Gava Media
- Jeddawi, Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*

(*Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Lubis, Solly M., Sol, 2007, *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju

Nawawi, Ismail, 2009, *Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara

Nugroho, Rianto, 2008, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo
Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grassindo

Parsons, W, 2005, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media

Ramses, Andi, dan La Bakry (ed), 2009, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: MIPI

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Walt, G, 1994, *Health Policy: An Introduction to Process and Power*.

Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Makalah :

Crichton, J., 2008, *Changing Fortunes: Analysis of Fluctuating Policy Space for Family Planning in Kenya*. Makalah disampaikan pada 22 June 2008

Gani, Ascobat, 2006, *Reformasi Pembiayaan Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Sistem Desentralisasi*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Nasional Desentralisasi Kesehatan, Bandung 6-8 Juni 2006.

Hidayanto, Djoko, 2009, *Anggaran BKKBN dalam Era Desentralisasi*. Sekretaris Dirjen PKPD.

Mardiyana dan Endang Sunarsih, 2009, *Pemberdayaan IMP; Rahasia Sukses Program KB di Era Otonomi Daerah*. BKKBN Provinsi Yogyakarta.

Mardiyana, 2009, *Harganas; Pembangunan Penduduk dan Keluarga Berencana*. BKKBN Provinsi Yogyakarta.

Siagian, Albiner, 2002, *Paradigma Baru Pembangunan Kesehatan; Suatu Kajian Kesiapan Daerah Menghadapi Desentralisasi Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702) Program Pascasarjana/S3 IPB, Oktober 2002, dipublikasikan 21 Oktober 2002.

Sudarmadi, Lalu, *Nilai-nilai Strategis Program Keluarga Berencana Nasional Bagi Pembangunan Bangsa*. Program Keluarga Berencana. BKKBN Provinsi Jakarta.

Syarief, Sugiri, 2006, *Perkembangan Program KB Nasional; Tantangan dan Peluang*. Makalah disampaikan pada BKKBN Pontianak, 29 Januari 2010.

Winarno, Budi, 2004, *Implementasi Konsep "Reinventing Government" dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional dengan judul "Penataan Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", Ruang Seminar "Penida Noor" FIA UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 14 Januari 2004.

Peraturan-peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70 Tahun 2001 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Sumber Lain:

BKKBN, 2008, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kependudukan tahun 2008.*

-----, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kependudukan tahun 2009.*

-----, *Kebijakan Program KB Nasional Tahun 2010*, Deputi IKPK Rakernas 2009, Badan Koordinasi Keluarga Berencana di Jakarta.

-----, *Rakernas Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana*

Tahun 2010, tema: "Dengan Semangat Kemitraan Kita Sukseskan Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Untuk Mencapai Sasaran RPJMN 2010-2014.

BKKBN Provinsi Banten, 2010, Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi Program KB Nasional Provinsi Banten, Rapat Kerja Daerah Program KB Tahun 2010.

TENTANG PENULIS

dr. Siti Hannah, MKM



Penulis lahir pada tanggal 4 Agustus 1980 di Jakarta. Penulis beragama Islam dan berstatus menikah. Riwayat pendidikan penulis yaitu Profesi Dokter di Universitas Tarumanagara, Jakarta dan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, Jakarta.

Pekerjaan penulis yaitu sebagai wakil ketua II STIF Syentra, sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden sejak tahun 2021 s/d sekarang, sebagai Ketua Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Jakarta III sejak tahun 2021 s/d sekarang, sebagai DPS Asuransi Syariah, dan sebagai Assesor RS Syariah.

Aktivitas organisasi yang diikuti penulis sekarang yaitu Pengurus LKPBNU, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Pengurus Pusat Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Pengalaman pekerjaan penulis yaitu sebagai Dokter PTT Daerah Provinsi Banten pada tahun 2007-2009, Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2010-2014, sebagai Dokter Dialog Interaktif Kerjasama PDUI dan BTPN pada tahun 2011-2014, sebagai Dokter Layanan Kesehatan Kerjasama PDUI dan BTPN pada tahun 2011-2014, sebagai Supervisor Kader Kesehatan Kerjasama PDUI dan BTPN pada tahun 2013-2014, sebagai Dokter Puskesmas Larangan Utara, Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2014-2016, Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019, dan sebagai Analisis Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2020-2021.